

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN LEGALISASI USAHA BERBASIS RISIKO BAGI UMKM MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara)

Oleh:

MAURA RAHMATUSYIEFA ADZANI

UMKM di Kabupaten Lampung Utara merupakan jenis usaha yang memerlukan legalitas. Legalitas usaha akan menjadi bukti bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM sah di mata hukum. Penerbitan legalitas UMKM dilakukan melalui sistem elektronik yaitu *Online Single Submission* (OSS) dan jenis legalitas usaha didasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dengan rinci dan sistematis mengenai pelaksanaan legalisasi usaha berbasis risiko bagi UMKM melalui sistem OSS, yang di dalam pelaksanaannya terdapat kewenangan DPM-PTSP Kabupaten Lampung Utara dan berbagai macam syarat dan prosedur yang harus terpenuhi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan ialah *non-judicial case* studi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan mendeskripsikan bahwa DPM-PTSP Kabupaten Lampung Utara memiliki kewenangan dalam pelaksanaan legalisasi usaha berbasis risiko bagi UMKM mulai dari penerbitan, hak akses, pendampingan, dan pengawasan pelaporan LKPM. Setiap usaha perseorangan maupun badan usaha yang akan melegalisasikan usaha haruslah memenuhi berbagai syarat dan prosedur dari masing-masing tingkat risiko yang ditentukan oleh KBLI. Berdasarkan tingkat risiko tersebut perolehan legalitas usaha dibedakan menjadi Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar, dan Izin. Dalam pelaksanaan legalisasi usaha tidak seluruhnya dapat terimplementasikan dengan baik dikarenakan terdapat beberapa hambatan. DPM-PTSP Kabupaten Lampung Utara sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan legalisasi usaha melalui sistem OSS memberikan solusi dalam mengatasi hambatan tersebut.

Kata kunci: DPM-PTSP, Legalisasi Usaha, *Online Single Submission*, UMKM.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF RISK-BASED BUSINESS LEGALITY FOR UMKM THROUGH AN ELECTRONICALLY INTEGRATED BUSINESS LICENSING SYSTEM

**(Study on the Investment Office and One-Stop Integrated Service of North
Lampung Regency)**

By:

MAURA RAHMATUSYIFA ADZANI

UMKM in North Lampung Regency are a type of business that requires legality. Business legality will be proof that business activities carried out by UMKM are legal in the eyes of the law. The issuance of UMKM legality is carried out through an electronic system, namely Online Single Submission (OSS) and the type of business legality is based on the risk level of business activities. This research aims to describe in detail and systematically the implementation of risk-based business legalization for UMKM through the OSS system, which in its implementation has the authority of DPM-PTSP North Lampung Regency and various requirements and procedures that must be met.

This type of research is empirical normative law research with a descriptive type of research. The problem approach used is a non-judicial case study. Data collection is carried out by interview and literature study. The data used in this study is primary data collected through interviews and secondary data consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collected is then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion describe that DPM-PTSP of North Lampung Regency has the authority in the implementation of risk-based business legalization for UMKM starting from issuance, access rights, assistance, and supervision of LKPM reporting. Every individual business or business entity that will legalize the business must meet various requirements and procedures from each risk level determined by KBLI. Based on the level of risk, the acquisition of business legality is divided into Business Registrarion Number, Strandard Certificate, and Permit. In the implementation of business legalization, not all of them can be implemented properly because there are several obstacles. DPM-PTSP North Lampung Regency as a government agency that has the authority to carry out business legalization through OSS system provides solutions in overcoming these obstacles.

Keywords: Business Legality, DPM-PTSP, Online Single Submission, UMKM.